LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P) TAHUN 2017

bapenda
Badung

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha Beliau sehingga Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Tahun Anggaran 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2017 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Mangupura, 10 Pebruari 2018
Kepala Badan Pendapatan Daerah/
Sedahan Agung Kabupaten Badung

I MADE SUTAMA,SH., MH
Pembina utama muda (IV/c)
NIP.19621231 199212 1 005

Daftar Isi

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
IKHTISAR EKSEKUTIF		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	Latar Belakang	1
	Ruang Lingkup	2
BAB II	**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**	**8**
	Rencana Strategis	8
	Strategi dan Arah Kebijakan Umum	12
	Rencana Kinerja	15
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	**17**
	Capaian Kinerja Organisasi	17
	Realisasi Keuangan	32
	Inovasi	35
BAB IV	**PENUTUP**	**43**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung bertanggungjawab terhadap Misi 1 dan Misi 3 Bupati Badung. Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1) Mewujudkan kerukunan hidup beragama, serta penguatan kehidupan adat dan budaya; (2) Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional. Selanjutnya Tujuan dimaksud dijabarkan kedalam Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Bapenda / Pasedahan Agung Kabupaten Badung sebagai berikut : **(1) Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak**;**(2) Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah** dan **(3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah**.

Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2017 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dengan capaian kinerja Tahun 2017 adalah sangat memuaskan dengan persentase mencapai **112,09%**.

Dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang selanjutnya diimplementasikan melalui program dan kegiatan strategis dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp.155.138.225.790,83** dengan capaian realisasi belanja sebesar **Rp.122.498.878.966,00** atau **78,96%**.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan pihak yang diwajibkan menyampaikan LKJIP adalah Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah rangkaian sistematik dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung serta Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Daerah nampak dengan jelas diuraikan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung merupakan unsur pelaksana menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu pula Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan program/rencana kerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

Sesuai dengan, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari :
    a) Sub Bagian Keuangan; dan
    b) Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
c. Bidang Data dan Teknologi Informasi terdiri atas :
    c) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
    d) Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Teknologi Informasi;
d. Bidang Penetapan terdiri atas :
    e) Sub Bidang Pemeriksaan; dan
    f) Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;
e. Bidang Penagihan dan Pasedahan terdiri atas :
    g) Sub Bidang Penagihan; dan
    h) Sub Bidang Pasedahan;
f. Unit Pelaksana Teknis Badung Selatan;
g. Unit Pelaksana Teknis Badung Utara;
h. Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 78 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah/

Pasedahan Agung Kabupaten Badung

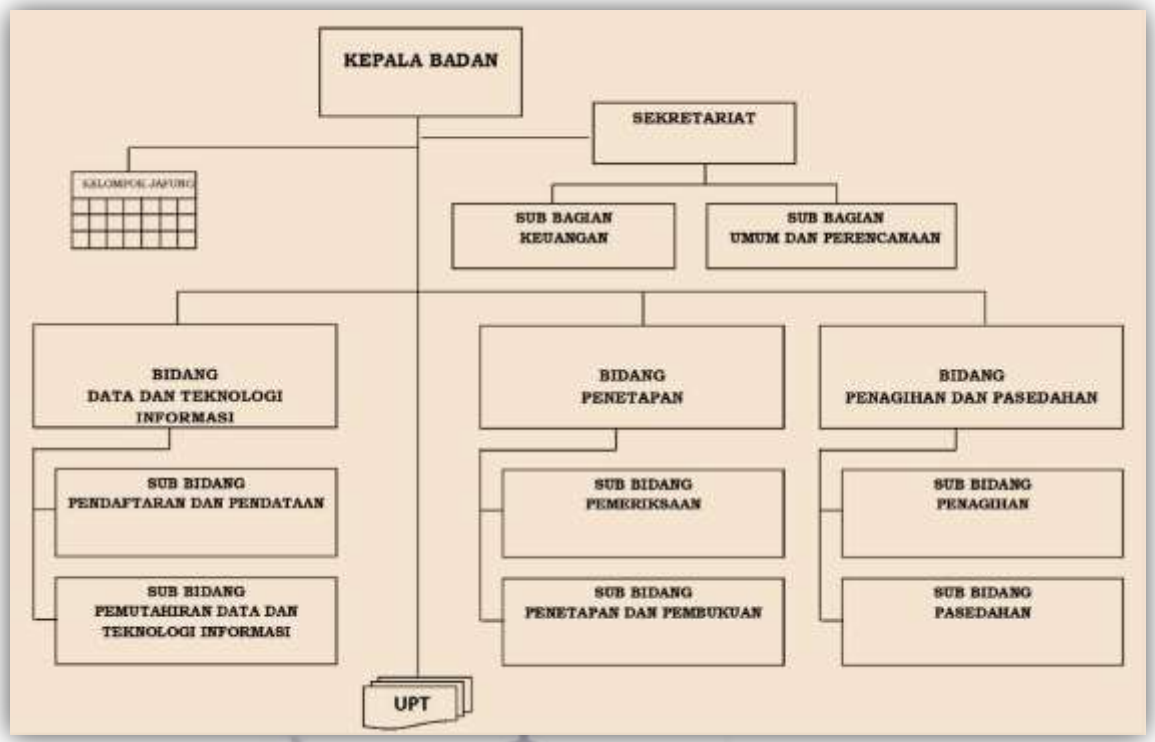

Sumber Daya Manusia

Bapenda / Pasedahan Agung Kabupaten Badung terdiri dari Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang dengan jumlah pegawai pada Tahun 2017 sebanyak 252 orang atau 2,96% dari keseluruhan jumlah pegawai Kabupaten Badung Tahun 2017, sebagaimana di tampilkan pada Grafik dibawah ini.

Ratio Jumlah Pegawai Bapenda / Pasedahan Agung Terhadap Jumlah Pegawai Kabupaten Badung Tahun 2017

Data Pegawai Bapenda / Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2017

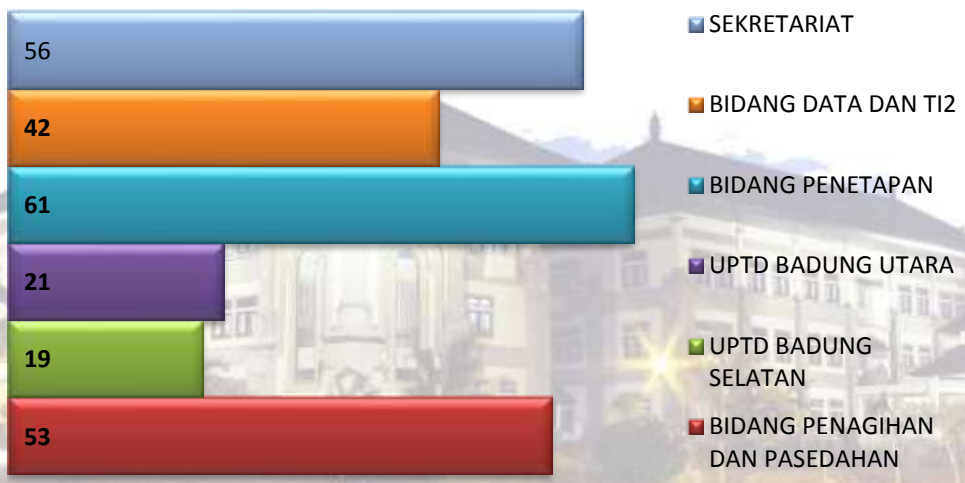

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

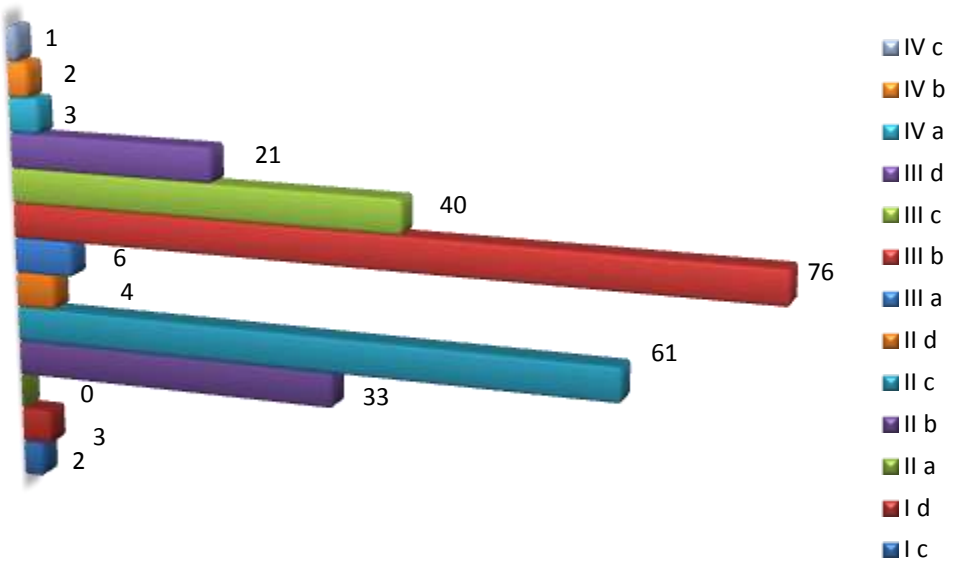

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

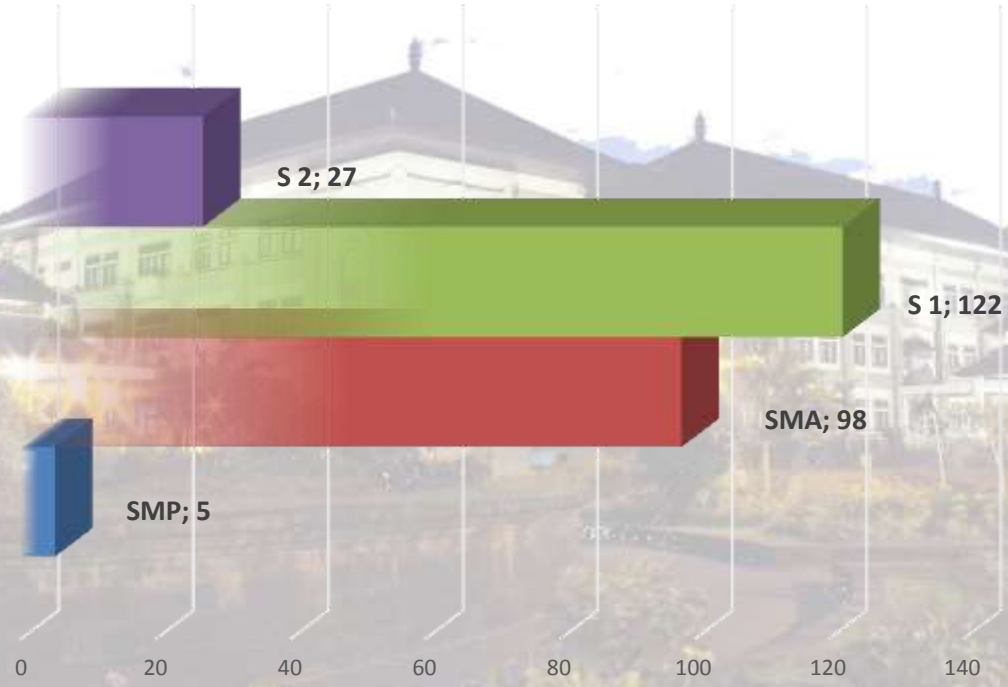

PERENCANAAN

DAN

PERJANJIAN KERJA

Rencana Strategis

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Pendapatan Daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Badung untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan startegis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan, menjadikan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten

Badung sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pendapatan.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

" MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA".

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi antara lain :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Dari 9 (sembilan) Misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung bertanggungjawab terhadap :

1. **Misi 1** : MEMPERKOKOH KERUKUNAN HIDUP BERMASYARAKAT DALAM JALINAN KERAGAMAN AGAMA, ADAT DAN BUDAYA.
2. **Misi 3** : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DENGAN MENERAPKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DAN *CLEAN GOVERNMENT.*

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. **Tujuan Misi 1** :

Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga Subak

Sasaran :

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak

b. **Tujuan Misi 3** :

Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung disajikan pada Tabel di bawah.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana* Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.	Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga Subak	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak
	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
   Strategi :
   a. Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai subak dan pentingnya peran subak di Daerah dalam mengembangkan nilai budaya.
   b. Pembinaan dan pelestarian subak sebagai wujud pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah.
   c. Meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap lembaga subak dan melindungi aset subak.

2. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government.*
   Strategi :
   a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.
   b. Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP).
   c. Membuat perencanaan yang baik.
   d. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Perangkat Daerah.
   e. Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah .

f. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara .
g. Memaksimalkan kapasitas fiskal daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
h. Mengkomunikasikan secara komperehensif program Badan kepada para pemangku kepentingan (stake holders).

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Badan Pendapatn Daerah/Pasedahan Agung untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun.

Arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dalam jangka waktu Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
   Arah Kebijakan :
   a. Melaksanakan sosialisasi tentang nilai-nilai subak dan pentingnya peran subak di Daerah dalam mengembangkan nilai budaya.
   b. Meningkatkan peran lembaga subak melalui pembinaan dan pelestarian subak sebagai wujud pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah.
   c. Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap subak dan upaya Pemerintah Daerah

untuk melestarikan lahan pertanian serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan subak.

2. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government.*

Arah Kebijakan :

a. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
b. Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Penapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
c. Meningkatkan koordinasi baik itu secara internal maupun eksternal dalam menyusun perencanaan.
d. Memaksimalkan pengelolaan anggaran yang tepat guna dan berbasis kinerja.
e. Meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).
f. Menugaskan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Teknis (Bintek) serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
g. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah.
h. Memperkuat sinergitas, penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja Badan secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*stake holders*).

Rencana Kinerja

Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung pada Tahun 2017 telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja yang memuat program ataupun kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021. Adapun sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga Subak. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah :
   a. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan:
      1) Penyelenggaraan Paruman Pekaseh dan Kelian SubaK Abian Se Kabupaten Badung
      2) Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura / Parahyangan Sungsungan SubakPelestarian Subak dan Subak Abian se Kabupaten Badung
      3) Pembinaan dan Penyuratan Awig-awig dan Perarem Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung
      4) Pembinaan Kelembagaan, Monitoring Bantuan dan Pemantauan Permasalahan
      5) Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung
2. Kategori Kapasitas Fiskal Daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah :
   a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan :
      1) Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah
      2) Sosialisasi paket regulasi tentang PBB
      3) Pendaftaran Wajib Pajak
      4) Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
      5) Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah
      6) Perhitungan Pajak Daerah

7) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
8) Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak
9) Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik
10) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain
11) Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir
12) Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah
13) Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah
14) Pengadaan Karcis Retribusi
15) Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah
16) Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah
17) Pendekatan Pelayanan PBB-P2
18) Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak
19) Pemeriksaan Atas Keberatan dan Permohonan Pengurangan Pajak Daerah
20) Pemungutan PBB-P2 Badung Utara
21) Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan
22) Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Secara Silent Operation
23) Pengadaan Alat Cash Register Online
24) Audit Sistem Informasi Pajak Daeah
25) Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan
26) Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan HAk Atas Tanah dan Bangunan) Badung Utara
27) Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah
28) Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah
29) Pengembangan Web Site Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
30) Monitoring dan Evaluasi Alat dan Sistem Pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
31) Pembuatan Aplikasi Pembacaan Water Meter
32) Pendataan dan Pemetaan Subyek dan Obyek Pajak PBB-P2
33) Penilaian Obyek Pajak PBB-P2
34) Pembuatan Sistem Informasi Penilaian Terintegrasi dan Pendataan PBB-P2

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya, yang hasilnya akan mejadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Analisis pencapaian kinerja Bapenda Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2017 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Bapenda / Pasedahan Agung Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dari hasil analisis pencapaian kinerja Bapenda Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2017 adalah berikut ini.

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak	Persentase Lembaga Subak Yang Masih Aktif	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (*dalam milyard rupiah*)	4.258,42	4.097,82	96,22 %
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	10,00 %	14,98 %	149,83 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	78	79,80	102,31 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2017				112,09%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dikemukakan analisis pencapaian masing-masing sasaran dan indikator kinerjanya sebagai berikut :

1. **Analisis Pencapaian Sasaran :**

   Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak

   Sasaran ini didukung oleh indikator **Persentase lembaga subak yang masih aktif** yang pada tahun 2017 dengan target 214 lembaga subak yang masih. Sampai dengan akhir tahun 2017 lembaga subak yang masih aktif sebesar 214 subak atau mencapai 100%

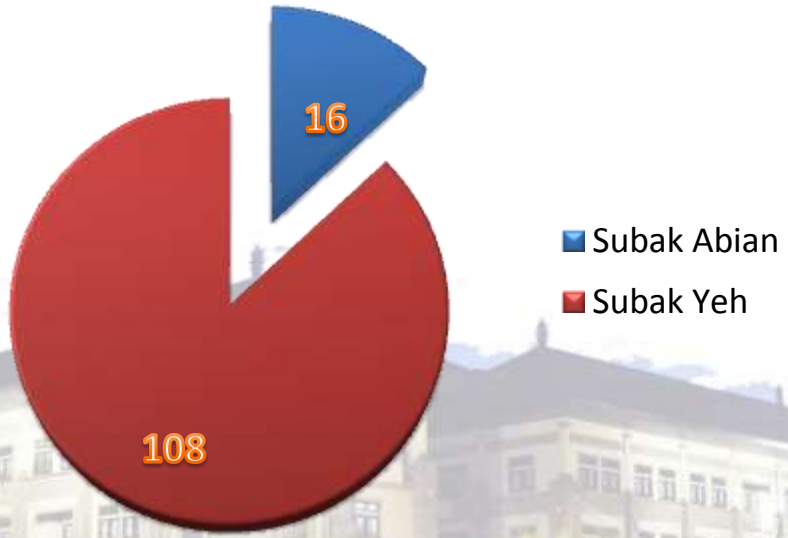

Sasaran ini adalah merupakan sasaran yang menunjang kekhususan Badan Pendapatan Daerah sebagai Pasedahan Agung yang dikelola oleh Bidang Penagihan dan Persubakan dimana pada Jaman Kerajaan di Bali, Raja memberikan tugas di bidang pertanian dan memungut pajak hasil bumi kepada Sedahan Agung.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang pada dasarnya mengatur tentang otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk membentuk Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sebagai wadah untuk melaksanakan penerimaan Pendapatan Daerah.

Selain melaksanakan kegiatan yang terkait dengan subak, Bidang Persubakan juga ikut membantu pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh UPTD PBB P2 dan BPHTB Badung Utara dan Badung Selatan terkait dengan Penyebaran SPPT PB B P2 dan membantu dalam Validasi BPHTB.

Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung antara lain :

a. Melakukan monitoring subak abian/yeh
b. Melakukan pembinaan kelembagaan subak
c. Mengkoordinir penyebaran SPPT PBB P2

Sistem pengairan di Bali diatur oleh suatu Lembaga Tradisional yang kita kenal istilah Subak. Subak sebagai lembaga tradisional yang bergerak di bidang pertanian dikenal sebagai organisasi agraris, ekonomis religius yang ada di Badung sejak dahulu dipertahankan keberadaannya sampai sekarang, merupakan salah satu kekayaan budaya nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam pelaksanaan otonomi Subak didukung oleh perangkat Subak terdiri dari :

a. Sedahan Agung adalah seorang Pejabat Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati untuk membina, mengawasi persubakan beserta perangkatnya ;
b. Sedahan adalah seorang petugas Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu Sedahan Agung;
c. Pekaseh adalah pemimpin Subak yang mengurus lahan basah;
d. Kelihan Subak pemimpin Subak yang mengurus lahan kering (Abian);
e. Krama Subak adalah Setiap orang yang mengerjakan satu cutak tanah sawah/lahan kering baik sebagai pemilik maupun penggarap dalam Wilayah Persubakan.

PERBANDINGAN JUMLAH SUBAK DI BALI TAHUN 2017

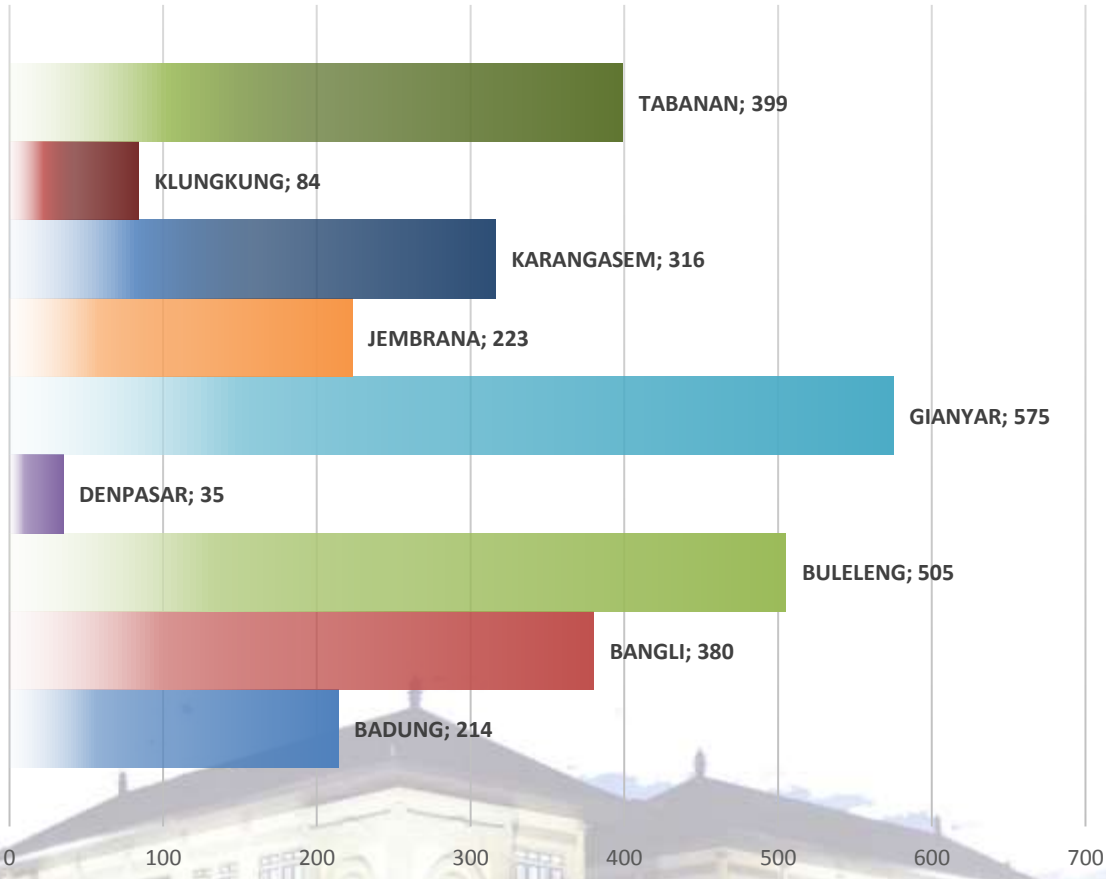

2. Analisis Pencapaian Sasaran :

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran ini didukung oleh 2 Indikator diantaranya :

a. Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai **Rp.4.097.512.655.295,82** dari target **Rp.4.258.418.287.640,42** atau **96,22%.**

Tidak tercapainya penerimaan PAD disebabkan oleh adanya beberapa faktor, diantaranya potensi pajak daerah yang tidak tergali secara maksimal karena kebijakan Pimpinan yang menggratiskan PBB-P2 untuk pertanian dan pemukiman.

Selain itu adanya Erupsi Gunung Agung pada akhir tahun 2017 yang berdampak pada pembatalan wisatawan luar negeri berkunjung ke Bali.

Realisasi PAD Kabupaten Badung
Tahun 2011 – 2017

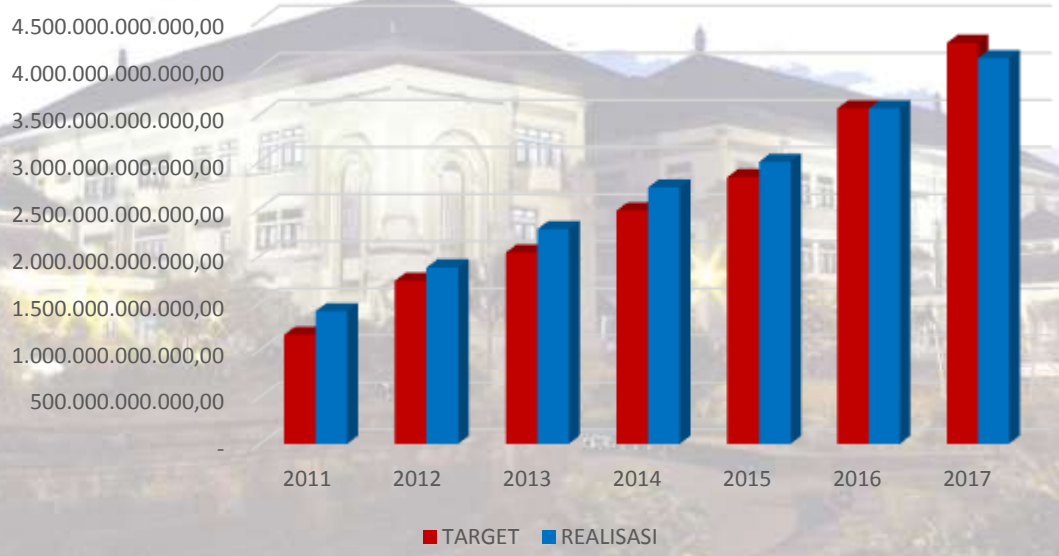

Target dan Realisasi PAD Kabupaten Badung dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat dari data dibawah ini :

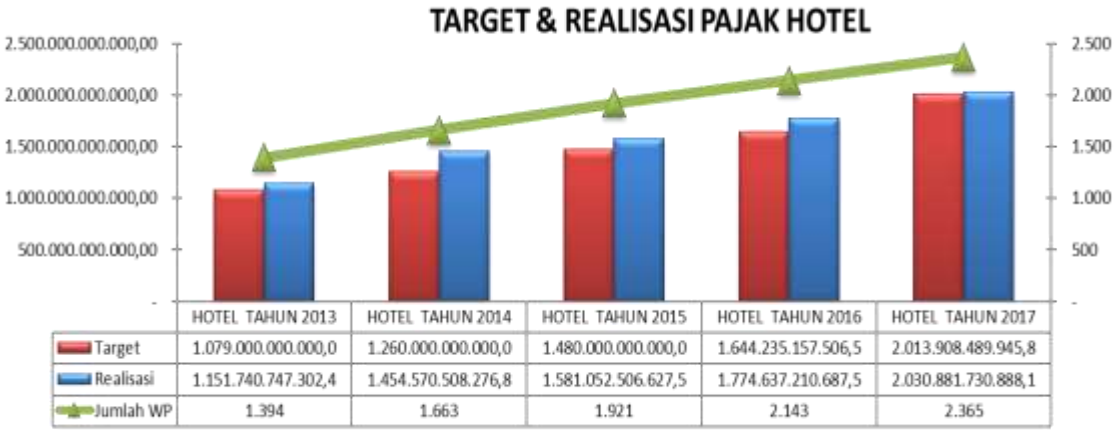

	HOTEL TAHUN 2013	HOTEL TAHUN 2014	HOTEL TAHUN 2015	HOTEL TAHUN 2016	HOTEL TAHUN 2017
Target	1.079.000.000.000,0	1.260.000.000.000,0	1.480.000.000.000,0	1.644.235.157.506,5	2.013.908.489.945,8
Realisasi	1.151.740.747.302,4	1.454.570.508.276,8	1.581.052.506.627,5	1.774.637.210.687,5	2.030.881.730.888,1
Jumlah WP	1.394	1.663	1.921	2.143	2.365

	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Target	164.000.000.000	204.000.000.000,00	277.000.000.000,00	336.913.444.429,51	451.934.732.794,59
Realisasi	199.522.362.960	264.628.244.501,50	323.955.235.028,38	400.430.447.729,69	475.939.453.837,94
JUMLAH WP	708	879	1.029	1.186	1.343

TARGET & REALISASI PAJAK HIBURAN

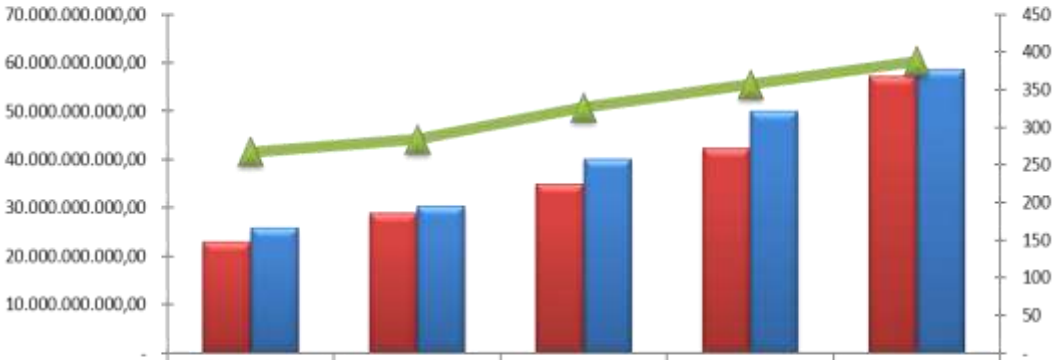

	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Target	23.000.000.000,0	29.000.000.000,0	35.000.000.000,0	42.425.540.097,7	57.156.365.804,6
Realisasi	25.755.951.881,3	30.338.040.073,2	40.083.804.463,5	49.931.515.970,4	58.585.763.641,7
Jumlah WP	267	284	326	357	388

TARGET & REALISASI PAJAK REKLAME

	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Target	5.200.000.000	11.000.000.000	13.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000
Realisasi	6.606.523.205	2.717.873.354	2.855.069.804	3.359.451.173	5.083.832.535
Jumlah Ijin	1.982	524	1.266	1.468	1.670

TARGET DAN REALISASI PAJAK PENERANGAN JALAN

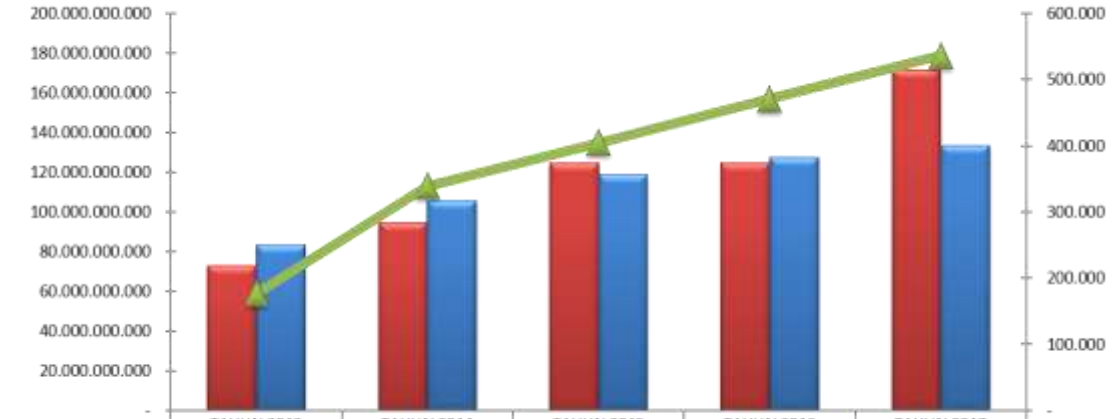

	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Target	73.070.033.670	94.708.461.743	124.810.318.000	124.810.318.000	171.695.203.507
Realisasi	83.270.114.851	105.458.642.666	118.905.915.655	127.241.622.807	133.418.468.059
Jumlah Rekening	176.547	338.941	404.746	470.551	536.356

TARGET DAN REALISASI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

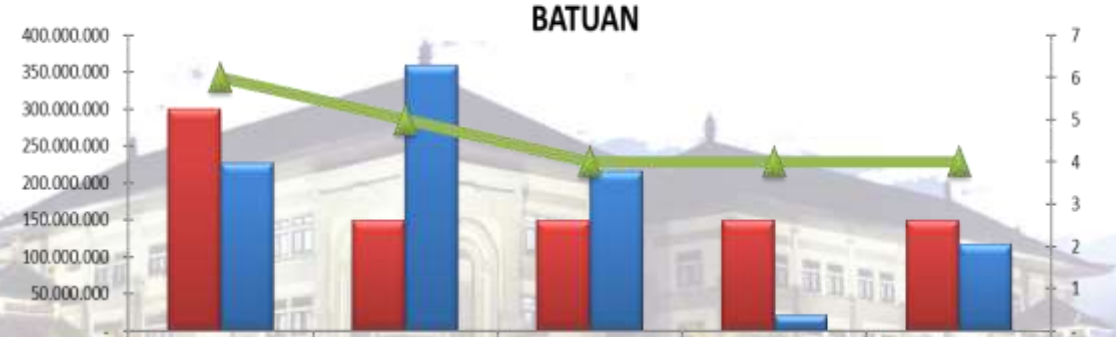

	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Target	300.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Realisasi	227.733.250	360.310.200	215.415.000	20.791.250	117.135.000
Jumlah WP	6	5	4	4	4

TARGET DAN REALISASI PAJAK AIR TANAH

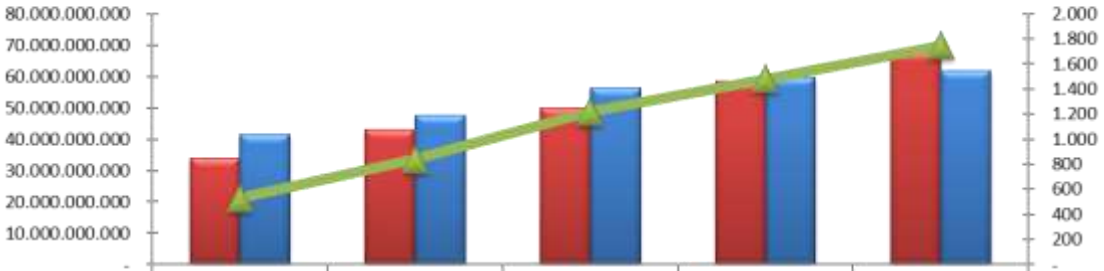

	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Target	34.000.000.000	43.000.000.000	50.000.000.000	58.632.907.326	67.999.755.546
Realisasi	41.407.510.659	47.633.381.104	56.426.593.385	59.690.339.774	61.833.665.205
Jumlah WP	529	840	1.218	1.481	1.744

TARGET DAN REALISASI PAJAK PARKIR

	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Target	7.800.000.000	10.000.000.000	12.500.000.000	13.937.172.845	17.870.464.649
Realisasi	8.531.587.176	11.316.542.750	13.401.127.735	16.265.744.500	26.750.432.202
Jumlah WP	12	12	18	18	18

TARGET & REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

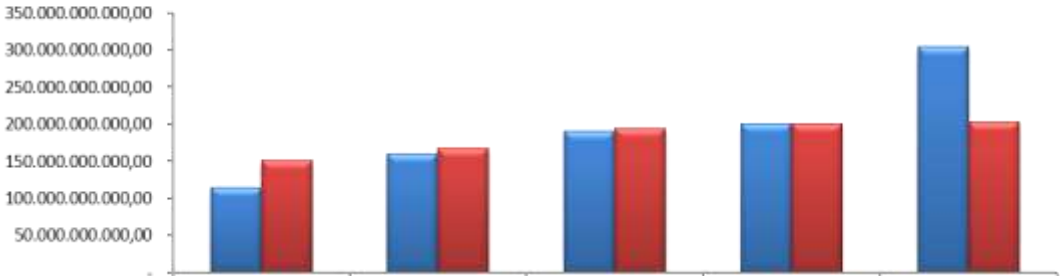

	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Target	115.000.000.000,00	160.000.000.000,00	190.000.000.000,00	200.000.000.000,00	303.941.706.597,58
Realisasi	151.044.070.595,00	167.063.875.993,00	194.309.999.378,00	200.341.280.784,00	202.880.857.648,00

TARGET & REALISASI BPHTB

	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Target	325.000.000.000,00	370.000.000.000,00	305.000.000.000,00	305.000.000.000,00	492.741.026.748,41
Realisasi	342.447.649.187,35	255.765.048.508,55	267.557.142.707,80	336.236.622.752,20	494.664.811.260,05

TARGET & REALISASI RETRIBUSI DAERAH

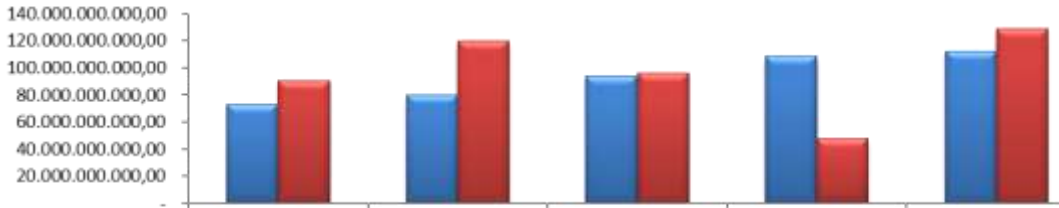

	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Target	73.110.899.131,5	80.024.689.456,0	93.910.097.956,0	108.430.000.000,	112.229.611.100,
Realisasi	90.414.480.742,0	119.532.049.975,	96.041.768.725,5	47.754.851.012,1	129.132.388.603,

TARGET & REALISASI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Target	71.350.280.431,03	125.308.093.791,18	142.703.761.532,77	185.948.219.473,21	261.914.832.947,45
Realisasi	71.350.739.922,03	125.339.002.877,94	142.995.660.239,30	186.013.183.404,14	255.932.876.432,35

TARGET & REALISASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH

	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Target	56.029.925.000,00	88.613.659.030,00	107.959.902.000,00	160.535.114.447,00	292.876.098.000,00
Realisasi	106.733.822.854,32	135.426.443.183,53	159.251.982.882,67	212.248.165.104,30	222.291.239.983,97

b. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung yang ditargetkan pada Renstra Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sebesar **10%** dengan realisasi **14,98%** atau capaian kinerja tahun 2017 untuk Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung mencapai **149,83 %.**

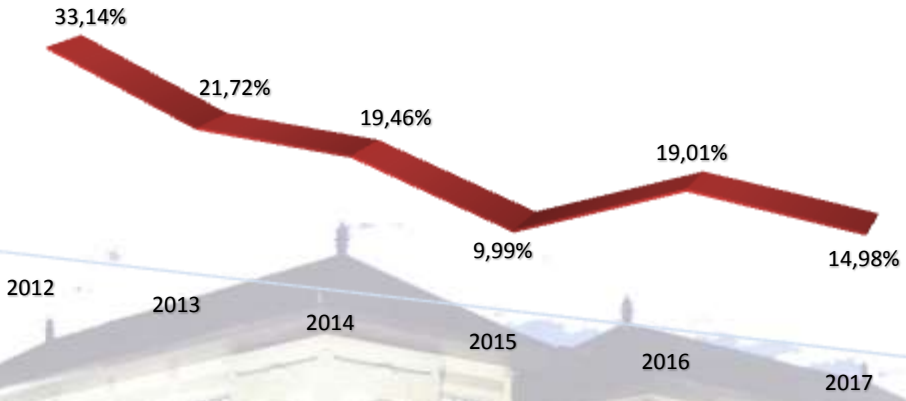

Perbandingan PAD Kabupaten Badung dengan
Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan
Tahun 2011 - 2017

3. **Analisis Pencapaian Sasaran :**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** yang pada tahun 2017 dengan target nilai **SKM 78**. Melalui penilaian oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung nilai SKM Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung pada tahun 2017 mendapat Nilai sebesar **79,80** atau dengan kata lain pencapaian kinerja pada sasaran ini mencapai **102,31%**.

Perbandingan Nilai SKM OPD Kabupaten Badung

Tahun 2017

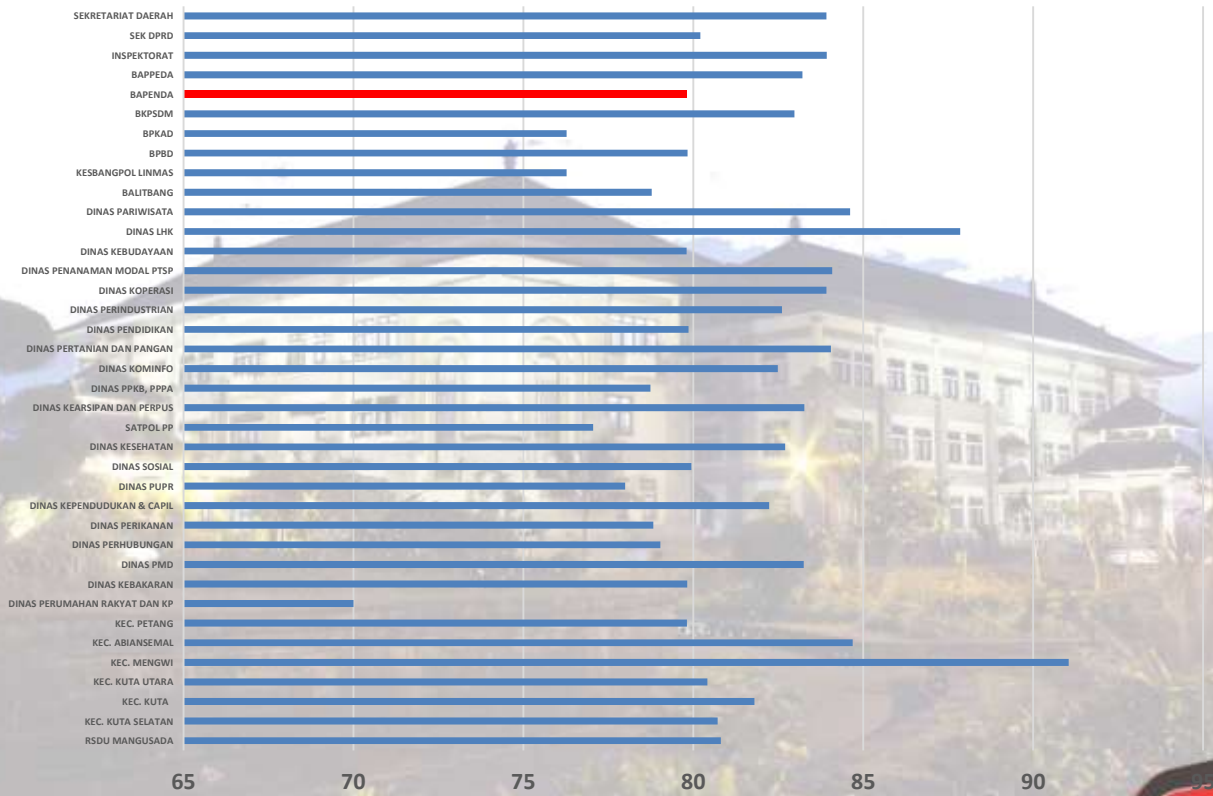

Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2017, Badan Pendapatan Daerah Pasedahan Agung Kabupaten Badung dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Visi dan Misi Bupati Badung, yang mengampu Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD SB 2016-2021, dimana Badan Pendapatan Daerah Pasedahan Agung Kabupaten Badung dapat mewujudkan 3 Sasaran dan 4 Indikator Kinerja, yang selanjutnya diimplementasikan melalui 2 Program dan 34 Kegiatan strategis dengan anggaran sebesar Rp.155.138.225.790,83, yang terdiri dari :

1.	Belanja Tidak Langsung	: Rp.	111.688.106.314,18
2.	Belanja Langsung	: Rp.	43.450.119.476,65
	a. Belanja Pegawai	: Rp.	1.146.823.600,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	: Rp.	26.448.751.515,25
	c. Belanja Modal	: Rp.	15.854.544.361,40

Realisasi belanja pada Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Pasedahan Agung Kabupaten Badung tertuang pada table berikut.

REALISASI PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	URAIAN	TARGET		REALISASI			
		FISIK	KEUANGAN (Rp.)	FISIK	%	KEUANGAN (Rp.)	%
1	**ProgramPengembangan Nilai Budaya**						
1.1	Penyelenggaraan Paruman Pekaseh dan Kelian SubaK Abian Se Kabupaten Badung	230 orang, 214 subak	11.589.400	230 orang, 214 subak	100,00	11.550.900	99,67
1.2	Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura / Parahyangan Sungsungan Subak	17 Parahyangan	455.231.800	17 Parahyangan	100,00	454.358.400	99,81
1.3	Pelestarian Subak dan Subak Abian se Kabupaten Badung	210 pekaseh/kelian subak, 830 pangliman	12.745.330.100	210 pekaseh/kelian subak, 830 pangliman	100,00	12.745.296.900	100,00
1.4	Pembinaan dan Penyuratan Awig-awig dan Perarem Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung	26 subak	306.035.800	26 subak	100,00	298.493.700	97,54
1.5	Pembinaan Kelembagaan, Monitoring Bantuan dan Pemantauan Permasalahan Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung	26 Subak	18.950.200	26 Subak	100,00	18.029.300	95,14
2	**Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah**						
2.1	Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah	1050 wajib pajak	86.014.000	1050 wajib pajak	100,00	84.502.000	98,24
2.2	Sosialisasi paket regulasi tentang PBB	600 wajib pajak	45.194.400	600 wajib pajak	100,00	40.923.700	90,55
2.3	Pendaftaran Wajib Pajak	1050 wajib pajak	133.248.200	1050 wajib pajak	100,00	117.999.100	88,56
2.4	Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	4000 wajib pajak	92.440.400	4000 wajib pajak	100,00	90.290.500	97,67
2.5	Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah	850 Wajib Pajak	317.414.400	850 Wajib Pajak	100,00	304.747.200	96,01
2.6	Perhitungan Pajak Daerah	4000 wajib pajak	360.740.000,0	4000 wajib pajak	100,00	332.500.600	92,17
2.7	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	3500 Wajib Pajak	112.495.600	3500 Wajib Pajak	100,00	105.369.650	93,67
2.8	Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak	50 wajib pajak	6.664.600	50 wajib pajak	100,00	5.891.200	88,40
2.9	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik	32 wajib pajak	432.493.200	32 wajib pajak	100,00	352.197.200	81,43
2.10	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain	37 Jenis Penerimaan	11.160.200	37 Jenis Penerimaan	100,00	8.460.000	75,81
2.11	Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir	600 Wajib Pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	20.446.000	600 Wajib Pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	100,00	19.581.100	95,77
2.12	Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah	10 jenis pajak	55.655.000	10 jenis pajak	100,00	44.089.900	79,22
2.13	Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	1866 wajib pajak	63.586.800	1866 wajib pajak	100,00	62.502.600	98,29
2.14	Pengadaan Karcis Retribusi	103750 buku	1.172.107.500	103750 buku	100,00	743.012.500	63,39
2.15	Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah	5799 wajib pajak	40.212.500	5799 wajib pajak	100,00	37.100.700	92,26
2.16	Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah	600 wajib pajak	17.395.000	600 wajib pajak	100,00	13.815.400	79,42

NO.	URAIAN	TARGET		REALISASI			
		FISIK	KEUANGAN (Rp.)	FISIK	%	KEUANGAN (Rp.)	%
2.17	Penyelenggaraan Konfigurasi Software Web Service Monitoring Transaksi Usaha Secara	500 wajib pajak	3.106.485.100	500 wajib pajak	100,00	2.906.522.900	93,56
2.18	Pengadaan Karcis Retribusi	58708 buku	709.524.300	58708 buku	100,00	424.546.060	59,84
2.19	Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah	3912 Wajib Pajak	40.819.425	3912 Wajib Pajak	100,00	35.476.525	86,91
2.20	Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah	600 Wajib Pajak	68.593.400	600 Wajib Pajak	100,00	59.330.250	86,50
2.21	Penyempurnaan ZNT/NIR PBB-P2	62 Desa/kelurahan	2.094.697.600	62 Desa/kelurahan	100,00	1.720.774.300	82,15
2.22	Pendekatan Pelayanan PBB-P2	464 Banjar/lingkungan	56.826.400	464 Banjar/lingkungan	100,00	48.453.700	85,27
2.23	Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak	1000 Wajib Pajak	48.730.000	1000 Wajib Pajak	100,00	48.114.000	98,74
2.24	Pemeriksaan Atas Keberatan Pajak Daerah yang diajukan Wajib Pajak	100 Keberatan	9.715.550	100 Keberatan	100,00	7.925.350	81,57
2.25	Penyusunan kajian proyeksi PAD tahun 2016 - 2021	40 buku	18.776.800	40 buku	100,00	17.526.600	93,34
2.26	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah	52 orang	24.868.500	52 orang	100,00	23.008.400	92,52
2.27	Pengadaan Alat Cash Register Online	10 Alat	198.204.800	10 Alat	100,00	195.974.800	98,87
2.28	Pengembangan SPTPD Online Terintegrasi	18 Fitur	100.816.300	18 Fitur	100,00	95.137.300	94,37
2.29	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	30 wajib pajak	24.710.000	30 wajib pajak	100,00	24.645.500	99,74

Inovasi

Inovasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung pada tahun 2017 dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran sesuai Renstra Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung 2016-2021 meliputi :

1. Website

Website adalah sering juga disebut Web, merupakan suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar diam ataupun bergerak, data animasi, suara, video maupun gabungan dari semuanya tentang Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung, baik itu yang bersifat statis maupun yang dinamis.

2. MAPATDA (Manajemen Pendapatan Daerah)

Aplikasi ini mengelola data Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir dari Tahun 1990 s.d 2012 Triwulan I. Aplikasi ini tidak dapat digabungkan dikarenakan data penerimaan pajaknya masih bersifat Official Assesment. Aplikasi ini berbasis Desktop.

3. iPROTAX (Integrated Profesional Tax)

a. SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak)
Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

b. SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah)
Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penerangan Jalan, Air Tanah dan Reklame

c. BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)

Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

d. SMART MAP

Aplikasi ini berbentuk peta yang berfungsi untuk memetakan objek pajak di Kabupaten Badung

e. DASHBOARD

Aplikasi ini berfungsi untuk menampilkan penerimaan per jenis pajak, per kecamatan sampai desa/kelurahan dalam bentuk grafik

Semua aplikasi di dalam iProtax berbasis web.

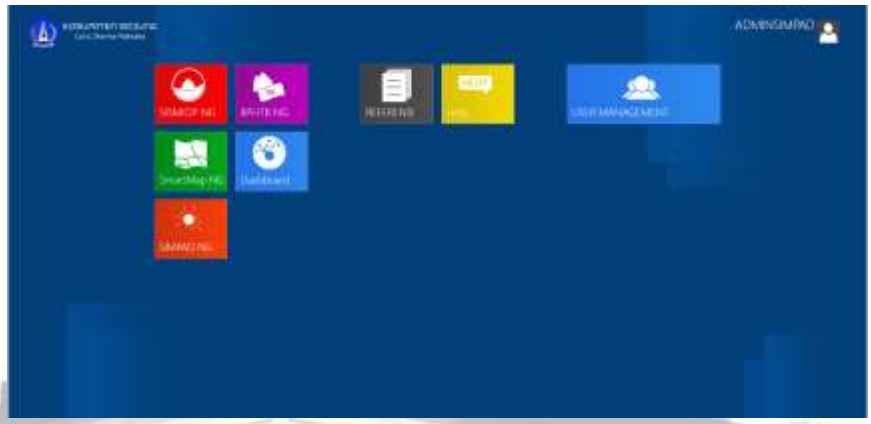

4. SIMOTO (Sistem Informasi Monitoring Transaksi Online)

Aplikasi ini berfungi untuk menampilkan data transaksi di wajib pajak yang telah di pasangkan tapping box, webservice maupun cash register. Data dari SIMOTO ini sudah terintegrasi dengan SIMPAD. Aplikasi ini berbasis web.

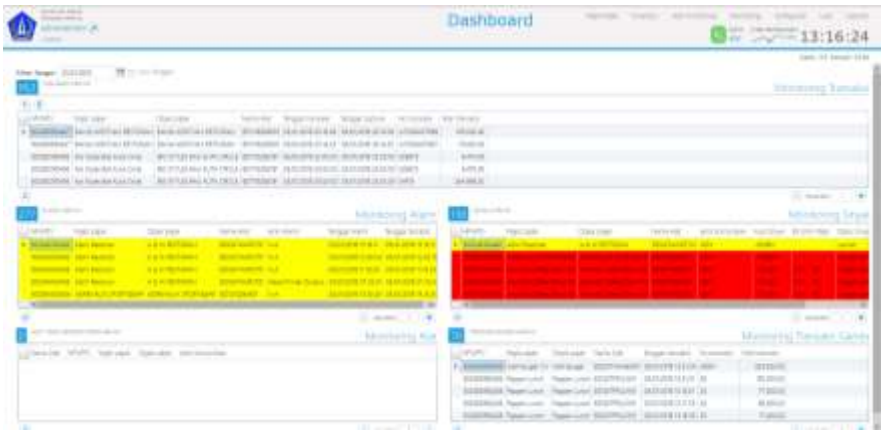

5. SIDUPA (Sistem Informasi Pengaduan Potensi Pajak)

Aplikasi ini berfungsi untuk petugas desa/kelurahan mengadukan potensi pajak yang ada pada daerahnya masing-masing. Hasil pengaduan dari petugas desa ini akan ditindaklanjuti oleh petugas Bapenda dengan cara mengecek pada Sistem dan apabila diperlukan langsung turun ke lapangan. Aplikasi ini berbasis web.

Aplikasi ini masih bersifat parsial (belum terintegrasi dengan aplikasi lainnya)

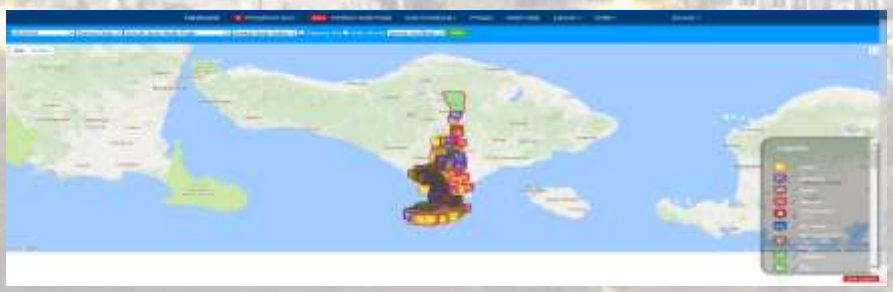

6. E-TAX (Electronic Tax)

E-Tax atau electronic tax merupakan fasilitas yang diberikan Bapenda kepada wajib pajak. Aplikasi ini berbasis web. Terdapat 19 menu yang disediakan yaitu :

1. Pelaporan SPTPD secara online
2. Pendaftaran NPWPD secara online
3. Pemberitahuan surat teguran pelaporan SPTPD secara online (setiap tgl 15 untuk wajib pajak hotel, restoran dan hiburan, dan tgl 10 untuk wajib pajak parkir)
4. Penyampaian STPD secara Online
5. Penyampaian SKPD Jabatan secara Online
6. Penyampaian SKPD-KB secara Online
7. Penyampaian SKPD Official secara Online
8. Pendaftaran BPHTB secara online
9. Pendaftaran PBB secara online
10. Penyampaian Surat Teguran Penagihan secara Online
11. Pengajuan Keberatan Pajak Secara Online
12. Pengajuan Pengurangan Pajak Secara Online
13. Pengajuan Kompensasi Pajak Secara Online
14. Pengajuan Restitusi Pajak Secara Online
15. Pengajuan Angsuran Pajak Secara Online
16. Penyampaian Himbuan Ketetapan Secara Online
17. Permohonan Mutasi PBB Secara Online
18. Permohonan Surat Keterangan Lunas Secara Online
19. Pemberitahuan Jatuh Tempo PBB Secara Online

7. HOST TO HOST BPD BALI

Aplikasi ini berupa webservice dengan menggunakan format message ISO 8583. Webservice ini berfungsi penghubung antara aplikasi yang ada pada BPD Bali dengan Aplikasi yang ada pada Bapenda Badung (SIMPAD dan Mapatda)

8. SIPPT (Sistem Informasi Penilaian Pajak Terpadu).

Aplikasi ini berfungsi untuk penilaian individu bangunan khusus yang langsung terintegrasi dengan Aplikasi SISMIOP. Aplikasi ini berbasis web.

9. iMotax (Integrated Mobile Tax)

Imotax adalah aplikasi yang digunakan untuk mengetahui lokasi Peta atas suatu Objek Pajak dimana dengan mengetahui lokasi Peta tersebut diharapkan terjadi mekanisme ekstensifikasi untuk menemukan potensi calon Objek Pajak yang belum terdaftar ataupun yang mengalami pemutakhiran.

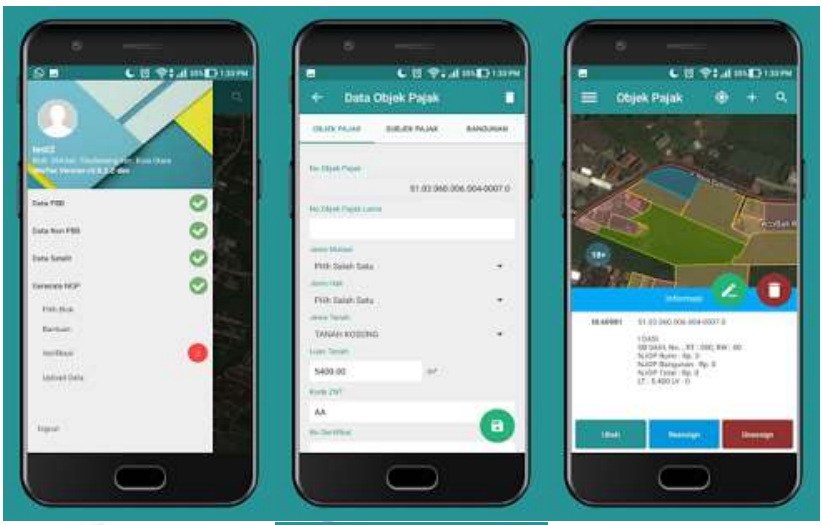

10. BPHTB Online

Aplikasi ini berfungsi pendaftaran proses pajak BPHTB secara online

Rencana Kedepan :

1. Mengembangkan aplikasi SIDUPA berbasis mobile (androind dan ios). Aplikasi ini berfungsi untuk mempermudah petugas lapangan menentukan letak / posisi dari wajib pajak. Dan data yang di dapatkan langsung terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Bapenda. SIDUPA juga akan terintegrasi dengan aplikasi iProtax
2. Website Bapenda terintegrasi dengan data yang ada pada iProtax dan SIDUPA
3. Mengembangkan aplikasi e-Tax dalam bentuk mobile application termasuk peta PBB dalam smart map.
4. Melakukan pengintegrasian SIMDA Keuangan dengan Aplikasi yang ada di Bapenda Badung (SIMDA dan SISMIOP)
5. Melakukan pengintegrasian Aplikasi yang berada pada Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Badung dengan Bapenda Kabupaten Badung terkait perijinan reklame dan TDUP
6. Penerimaan pembayaran pajak melalui BRI dan Bank Mandiri.

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Badung Tahun 2016-2021, maka Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung telah menetapkan 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja yang dijabarkan kedalam 2 Program dan 34 Kegiatan strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga sasaran tersebut dapat dicapai dengan interprestasi memuaskan. Sedangkan kalau dilihat berdasarkan pencapaian masing–masing target kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa tiga indikator kinerja tersebut telah mencapai target 100%, sedangkan satu indikator kinerja lainnya mencapai target 96,22%, dengan serapan APBD Kabupaten Badung mencapai 78,96%.

Selanjutnya, pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/ hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.